

PENGARUH *INTERGOVERNMENTAL REVENUE*, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAN BELANJA MODAL TERHADAP KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA DI JAWA TIMUR

Ryansyah Ilham Sasti*, Maslichah, Junaidi*****

syahryan74@gmail.com

Universitas Islam Malang

ABSTRACT

The monetary performance of local governments is a measure of the success of nearby government in managing resources coming from their areas or important authorities. control independently and collaboratively gives extraordinary provider to the network. The motive of this look at turned into to decide the effect of intergovernmental sales, local seed sales (PAD) and capital expenses on the monetary performance of the regency/town authorities in East Java in 2017-2020. This study used an associative method with a quantitative method. The statistics used are secondary information with a time collection of 4 years. the public uses the Audit record (LHP) received from the perfect Audit frame. The sampling method used focused sampling and acquired 29 districts and nine cities in East Java. more than one linear regression evaluation become used inside the records analysis. whilst processing data, IBM Statistical package deal for the Social Sciences type 22 is used. The results of this look at provide an explanation for that intergovernmental revenues have a terrible impact at the economic performance of nearby government. The VARIABLE PAD has a vast high-quality impact on the economic overall performance of the local authorities, and the variable capital expenditure does no longer have an effect on the monetary overall performance of the regional government.

Keyword: *Intergovernmental Revenue, Regional Original Revenue and Capital Expenditure, Regional Government Financial Performance.*

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Periode krisis keuangan di era reformasi menghipnotis negara dan sistem ekonomi pada Indonesia. Hal ini menyebabkan pemerintah segera menerapkan reformasi pada semua bidang.

Undang-Undang angka 22 Tahun 1999 ihwal pelaksanaan swatantra wilayah, yang lalu digantikan sang Undang-Undang Ekonomi wilayah nomor 32 Tahun 2004. menggunakan demikian, terdapat pergeseran dalam sistem manajemen terpusat menuju sistem negara yang terdesentralisasi.

Tinjauan pelaksanaan Semester (IHPS) II 2018 sesuai menggunakan ketentuan Undang-Undang nomor 15 Tahun 2004. Tinjauan ini adalah kompendium dari 496 Laporan pemeriksaan (LHP) yang diselesaikan oleh BPK di semester II-2018, yang terdiri dari 2 laporan keuangan LPH (LHP) (49,2%) serta 250 LHP dengan tujuan khusus (DDT) (50,4%).

Secara lebih rinci, BPK mengidentifikasi 4.376 konklusi yang berisi 6.760 persoalan. meliputi 1.203 (20%) persoalan kelemahan Sistem Pengendalian Internal (SPI) serta 2.161 (35%) masalah ketidakpatuhan terhadap ketentuan tindakan hukum peraturan senilai 4,79 triliun rupiah, serta 2.712 (45%) masalah tidak menabung, inefisiensi dan inefisiensi sebesar 1,50 triliun rupiah, rincian rekapitulasi, akibat pemeriksaan BPK.

Jawa Timur menerima perhatian berasal DPD RI, yaitu dalam pengelolaan otoritas lokal. terdapat peningkatan jumlah daerah yang telah mendapatkan peringkat yang wajar dengan pengecualian. Hal ini dievaluasi menjadi perkembangan yang luar biasa di tengah upaya pemerintah pusat untuk mempertinggi kinerja Pemerintah Daerah. Apalagi, penurunan perkiraan pelaporan keuangan sangat ironis di tengah upaya membasmi korupsi. Komisi Audit

(BPK) Republik Indonesia, juru bicara Jawa Timur, mengatakan terdapat 3 bupati serta kota berasal 38 wilayah Jawa Timur yang sudah mendapatkan pendapat *Fair With Exception* (WDP), yakni Kabupaten Jember, Kabupaten Tulungagung dan Kota Pasuruan.

Pendapatan Antar pemerintah atau juga dikenal sebagai dana pemerataan, merupakan dana dukungan yang mengalir asal pemerintah sentra ke pemda menjadi dana buat acara pemda. Pendapatan Awal wilayah (PAD) artinya dana yang didasarkan pada hasil kemandirian wilayah itu sendiri, yaitu akibat pungutan wilayah, pajak wilayah, dan pengelolaan modal wilayah. Belanja modal bisa diartikan sebagai alokasi uang yang direncanakan buat perolehan aset tetap yang memiliki masa manfaat ekonomi lebih berasal satu periode akuntansi, mirip properti, pabrik serta peralatan, tanah, bangunan.

Pernyataan dilema

Sesuai latar belakang yang telah dijelaskan, dimungkinkan buat merumuskan persoalan 1) Bagaimana akibat pendapatan antar pemerintah, pendapatan awal daerah serta belanja modal terhadap kinerja keuangan pemerintah kabupaten/kota pada Jawa Timur pada tahun 2017-2020?. 2) Bagaimana imbas pendapatan antar pemerintah terhadap kinerja keuangan pemerintah kabupaten/kota pada Jawa Timur pada tahun 2017-2020?. 3) Bagaimana PAD menghipnotis kinerja keuangan pemerintah kabupaten/kota di Jawa Timur di tahun 2017-2020?. 4) Bagaimana belanja modal mensugesti kinerja keuangan pemerintah kabupaten/kota pada Jawa Timur pada tahun 2017-2020?

Tujuan penelitian

Penelitian ini bertujuan buat mengetahui akibat pendapatan antar pemerintah, PAD serta belanja modal terhadap kinerja keuangan pemerintah kabupaten/kota pada Jawa Timur di tahun 2017-2020, buat mengetahui dampak pendapatan antar pemerintah terhadap kinerja keuangan pemerintah kabupaten/kota di Jawa Timur pada tahun 2017-2020, buat mengetahui akibat pad terhadap kinerja keuangan pemerintah kabupaten/kota di Jawa Timur di tahun 2017-2020, dan buat mengetahui dampaknya terhadap dampaknya belanja modal atas kinerja keuangan pemda Kabupaten pada Jawa Timur pada 2017-2020.

Manfaat Penelitian

Donasi terhadap penelitian merupakan menjadi berikut:

1. Teoritis

Buat penelitian lebih lanjut dapat digunakan menjadi sumber acuan dan materi pelatihan terkait variabel pendapatan pemerintah, pendapatan awal daerah serta belanja modal.

Buat bidang akuntansi dapat dipergunakan menjadi asal referensi yang berkaitan dengan akuntansi sektor publik dan manajemen keuangan.

2. Kepraktisan

Bagi Pemerintah bisa dijadikan asal acuan perumusan kebijakan serta bagi warga menjadi sumber gosip indikator keuangan daerah.

LANDASAN TEORITIS PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Teori Agensi

Dari (Mardianis, dkk, 2017), Teori *Agency* merupakan teori yang mengungkapkan adanya korelasi kontraktual antara agen serta prinsipal. menjadi agen, manajer secara etis bertanggung jawab buat memaksimalkan laba pemilik (delegasi). Pada sisi lain, dia jua tertarik buat memaksimalkan kesejahteraannya sendiri.

Pendapatan antar pemerintah

Sesuai menggunakan UU No. 33 Tahun 2004, pasal 1 ayat 3 menyatakan bahwa pendapatan antar pemerintah atau dana berimbang ialah alokasi asal daya keuangan yang setara, profesional, demokratis, transparan dan efisien dalam rangka biaya desentralisasi, menggunakan mempertimbangkan kapasitas, situasi dan kebutuhan daerah, serta besarnya pendanaan untuk desentralisasi serta donasi.

Pendapatan daerah (PAD)

Undang-Undang angka 33 Tahun 2004 menjelaskan bahwa pendapatan awal wilayah mengacu pada pendapatan yang diperoleh suatu daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

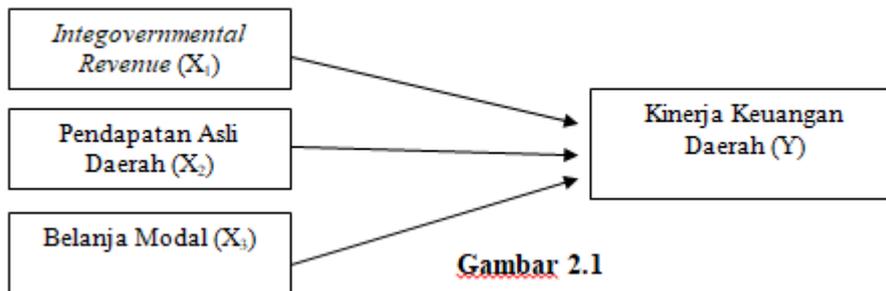
Belanja kapital

Belanja kapital adalah aktivitas di antara belanja modal pemerintah yang berguna untuk menaikkan aset permanen serta bisa menyampaikan manfaat dalam jangka panjang.

Keuangan

Indikator keuangan wilayah artinya kemampuan suatu daerah pada mengelola dan memanfaatkan kekayaan finansial Wilayah buat memenuhi kebutuhan daerah (Ahmad,2019). Menaikkan kinerja keuangan pemda adalah salah satu cara buat menaikkan pangsa kemandirian pada pemerintahan sendiri wilayah. Salah satu indikator kinerja yang bisa mendeskripsikan kinerja otoritas lokal artinya pengukuran akibat keuangan, yang diukur dengan sistem pemantauan kinerja.

Kerangka Konseptual



Gambar 2.1

Kerangka Konseptual

Hipotesis

H1 : Pendapatan antar pemerintah, pendapatan awal daerah dan belanja kapital lawan Indikator Keuangan wilayah Bupati/Kota Jawa Timur 2017-2020

H1a : Pendapatan Antar pemerintah untuk Indikator Keuangan wilayah Bupati/Kota pada Jawa Timur 2017-2020

H1b: Pendapatan benih wilayah buat indikator keuangan kabupaten/kota wilayah di Jawa Timur pada 2017-2020.

H1c : Belanja kapital atas Kinerja Keuangan Pemerintah Negara/Kota pada Pulau Jawa Timur di 2017-2020

METODOLOGI PENELITIAN

Jenis penelitian

Metode penelitian pada penelitian ini merupakan metode kuantitatif deskriptif korelasi. Metode kuantitatif artinya penelitian yang memakai nomor dan kemudian melakukan pengujian statistik sang Sugiyono (2015:7). Metode penelitian deskriptif korelasional yang dipergunakan untuk mengetahui hubungan antara variabel pendapatan antar pemerintah, pendapatan awal daerah, dan belanja kapital dengan kinerja keuangan daerah Sugiyono (2015:87). Pengambilan sampel menggunakan metode sensus. Data yang dipergunakan pada penelitian ini merupakan data sekunder.

Populasi dan sampel

Populasi penelitian ini adalah pemda kabupaten/kota yang berada pada provinsi Jawa Timur pada tahun 2017-2020. Sampel tersebut memakai metode pengambilan sampel yang ditargetkan dengan mengidentifikasi kriteria yang telah diidentifikasi, yaitu wilayah pada Jawa Timur yang terdaftar di Kementerian pada Negeri (Kemendagri) serta bupati yang telah diverifikasi oleh BPK RI pada tahun 2017-2020.

Variabel pengukuran dan operasional

Variabel bebas dalam penelitian ini adalah *intergovernmental income*, PAD, dan *capital expenditure*. Sedangkan variabel tadi terkait, yaitu kinerja keuangan pemerintah sendiri wilayah. Variabel pengukuran dan operasional yang dipergunakan pada penelitian ini mencakup:

1. Pendapatan antar pemerintah merupakan sumber dana wilayah yang diterima berasal pemerintah sentra serta digunakan buat membiayai kegiatan pemda. Perhitungan pendapatan antar pemerintah dari Pratama, dkk (2021) bisa dirumuskan menjadi berikut:

$$R = \frac{\sum \text{Realisasi Intergovernmental Revenue}}{\sum \text{Realisasi Pendapatan Pemda}}$$

2. Pendapatan Awal wilayah (PAD) Pendapatan awal wilayah berdasarkan Undang-Undang angka 33 Tahun 2004 ialah sumber pendapatan daerah yang berasal asal pengelolaan asal daya wilayahnya sendiri dan dipergunakan buat kesejahteraan masyarakat. Pratama, dkk (2021) Pendapatan wilayah dapat diringkas menjadi berikut:

$$\text{PAD} = \frac{\sum \text{Realisasi Pendapatan Asli Daerah}}{\sum \text{Realisasi Pendapatan Pemda}} \times 100\%$$

3. Belanja modal ialah belanja daerah yang digunakan buat mempertinggi aset permanen wilayah serta memiliki masa manfaat Muhammad, dkk (2015). Belanja kapital bisa dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{BM} = \frac{\sum \text{Realisasi Belanja Modal}}{\sum \text{Realisasi Pendapatan Pemda}} \times 100\%$$

4. Kinerja keuangan Pemerintah Daerah (Y) diukur dengan menggunakan faktor efisiensi. Variabel rasio efisiensi dipergunakan untuk menggambarkan kemampuan daerah membelanjakan keuangan daerah untuk pendapatan Pemerintah Daerah. Koefisien Efisiensi dari Ahmad (2019:170) bisa dirumuskan menjadi berikut:

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{\sum \text{Realisasi Belanja Daerah}}{\sum \text{Realisasi Pendapatan Pemda}} \times 100\%$$

Sumber dan metode pengumpulan data

Sumber data adalah sumber info yang dikumpulkan sang peneliti serta membutuhkan proses pengolahan data tingkat lanjut yang bermanfaat buat merampungkan problem siyoto dan Sodik (2015: 68). Data yang dipergunakan ialah Laporan inspeksi (LHP) 2017-2020 Pemerintah Kabupaten provinsi Jawa Timur, yang dikeluarkan sang BPK RI.

Metode analisis data

Analisis regresi linier berganda artinya alat analisis yang dipergunakan buat memilih arah imbas variabel bebas terhadap variabel terkait pada contoh regresi Nihayah (2019:16). alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini ialah SPSS tipe 22.

**Hasil Penelitian Pembahasan
 Statistik Deskriptif**

Tabel 4.2
Hasil Uji Analisis Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
IR (x ₁)	152	.23	.90	.6430	.09891
PAD (X ₂)	152	.03	.61	.1710	.08533
BM(x ₃)	152	.07	.37	.1705	.04784
KKD (Y)	152	.64	1.13	.9588	.07913
Valid N (listwise)	152				

Sumber: Data sekunder diolah SPSS 22, 2022

Akibat uji statistik naratif tersebut berisi 152 data yang dinyatakan valid. Volume data diperoleh asal 38 kota serta kabupaten pada Jawa Timur, yaitu: Pendapatan Antar pemerintah (IR) ialah variabel independen dengan nilai terendah 0,23; nilai tertinggi artinya 0,90; homogen-rata artinya 0,6430 dan nilai deviasi standar adalah 0,09892. Pendapatan asli wilayah (PAD) artinya variabel independen dengan nilai terendah 0,03; nilai tertinggi ialah 0,61; nilai rata-homogen ialah 0,1710 serta nilai deviasi baku artinya 0,08533. Belanja modal (BM) – variabel independen menggunakan nilai terendah 0,07; nilai tertinggi adalah 0, 37; rata-rata ialah 0,1705 serta nilai deviasi standar artinya 0,04784. Indikator Keuangan daerah (KKD) merupakan variabel independen menggunakan nilai terendah 0,64; skor tertinggi adalah 1,13; nilai rata-homogen ialah 0,9588 dan nilai deviasi baku merupakan 0,07913.

Hasil Uji Normalitas

Tabel 4.3
Hasil Uji Normalitas Data

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test				
	KKD	IR	PAD	BM
N	152	152	152	152
Normal Parameters ^{a,b} Mean	13.9020	.7781	.1710	.1756
Std. Deviation	2.59719	.01941	.08533	.05028
Most Extreme Differences				
Absolute	.108	.107	.188	.078
Positive	.097	.107	.188	.078
Negative	-.108	-.092	-.163	-.043
Kolmogorov-Smirnov Z	1.337	1.319	1.056	.962
Asymp. Sig. (2-tailed)	.056	.062	.214	.313
a. Test distribution is Normal.				
b. Calculated from data.				

Sumber: Data sekunder diolah SPSS 22, 2022

Akibat uji normalitas memakai alat uji *One Sample K-S* menyebutkan bahwa data yang digunakan dalam penelitian tadi umumnya didistribusikan. Ini sebab biaya *Asymp Sig. (2-tailed)* harganya >0,05.

Hasil Uji Asumsi Klasik

a. Hasil Uji Multikolinieritas

Tabel 4.4
Hasil Uji Multikolinieritas

Coefficients ^a							
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1 (Constant)	1.169	.083		14.084	.000		
IR	-.262	.099	-.327	-2.635	.009	.412	2.426
PAD	-.137	.116	-.148	-1.185	.238	.410	2.439
BM	-.108	.133	-.065	-.814	.417	.987	1.013

a. Dependent Variable: KKD

Sumber: Data sekunder diolah SPSS 22, 2022

Akibat uji multikolinieritas bisa dicermati jika variabel eksplanasi di model regresi tidak memenuhi multikolinieritas karena nilai toleransi lebih besar berasal 0,10 dan nilai VIF kurang dari 10,00.

a. Hasil Uji Heterokedastisitas

Tabel 4.5
Hasil Uji Heteroskedastisitas

Correlations						
			KKD	IR	PAD	BM
Spearman's rho	KKD	Correlation Coefficient	1.000	-.098	-.009	.018
		Sig. (2-tailed)	.	.228	.913	.821
		N	152	152	152	152
	IR	Correlation Coefficient	-.098	1.000	-.444**	.000
		Sig. (2-tailed)	.228	.	.000	.997
		N	152	152	152	152
	PAD	Correlation Coefficient	-.009	-.444**	1.000	-.026
		Sig. (2-tailed)	.913	.000	.	.754
		N	152	152	152	152
	BM	Correlation Coefficient	.018	.000	-.026	1.000
		Sig. (2-tailed)	.821	.997	.754	.
		N	152	152	152	152

Sumber: Data sekunder diolah SPSS 22, 2022

Berasal akibat uji heteroskedastisitas, dapat ditarik konklusi bila variabel independen pada persamaan model regresi tak memenuhi heteroskerastisitas. karena nilai Sig 2 arah lebih besar asal 0,05, oleh sebab itu terdapat baiknya menggunakan model regresi.

Hasil Uji Autokorelasi

Tabel 4.6
Hasil Uji Autokorelasi

Model Summary ^a					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.240 ^b	.058	.039	.07759	1.716

a. Predictors: (Constant), BM, IR, PAD
 b. Dependent Variable: KKD

Sumber: Data diolah SPSS 22, 2021

Akibat uji autokorelasi mempunyai nilai dW 1,716, sedangkan nilai tabel dW dengan nilai 0,05; jumlah data 152; variabel penerangan tiga; $dL = 1,6948$ dan dU 1,7752. menggunakan demikia, persamaan dapat dilakukan menjadi berikut $dU < dW < 4-dU$ ($1.7488 < 1.716 < 2.2512$), sehingga kita bisa menyimpulkan Bila persamaan contoh regresi tak terjadi autokorelasi.

Hasil Uji Regresi Linier Berganda

Tabel 4.7
Hasil Uji Analisis Regresi Linier Berganda

Coefficients ^a					
Model	Unstandarized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	1.169	.083		14.084	.000
IR	-.262	.099	-.327	-2.635	.009
PAD	-.137	.116	-.148	-1.185	.038
BM	-.108	.133	-.065	-.814	.417

a. Dependent Variable: KKD

Sumber: Data sekunder diolah SPSS 22, 2022

Hasil uji analisis regresi linier berganda dapat dibuat sebuah persamaan regresi sebagai berikut

$$\text{KKD} = 1.169 - 0.262 \cdot \text{IR} - 0,137 \cdot \text{PAD} - 0,108 \cdot \text{BM} + e$$

(0,09)
(0,038)
(0,417)

- KKD : Kinerja Keuangan Daerah
- IR : *Intergovernmental Revenue*
- PAD : Pendapatan Asli Daerah
- BM : Belanja Modal
- e* : *Error*

Hasil Uji Hipotesis

a. Hasil Uji F

Tabel 4.8
Hasil Uji F

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	.055	3	.018	3.020	.032 ^b
	Residual	.891	148	.006		
	Total	.945	151			

a. Dependent Variable: KKD
 b. Predictors: (Constant), BM, IR, PAD

Sumber: Data sekunder diolah SPSS 22, 2022

Akibat uji F dapat dijelaskan bahwa nilai F adalah 3,020 dengan nilai Sig 0,032 < 0,05, lalu H1 diterima dan H0 ditolak. dengan demikian, variabel pendapatan antar pemerintah, pendapatan awal daerah dan belanja modal secara beserta-sama menyampaikan akibat yang signifikan terhadap kinerja keuangan wilayah.

Hasil Uji R²

Tabel 4.9
Hasil Uji Determinasi

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.240 ^a	.058	.039	.07759

a. Predictors: (Constant), BM, IR, PAD

Sumber: Data sekunder diolah SPSS 22, 2022

Hasil pengujian mempunyai nilai R Square sebanyak 0,058, yang berarti ada korelasi antara variabel bebas (*Intergovernmental revenues, regional initial revenues, serta capital expenditure*) serta *associated variable (Regional Financial Measures)* sebesar 5,8%, sedangkan 94,2% dipengaruhi oleh variabel lain di luar model regresi penelitian ini.

Hasil Uji t

Tabel 4.10
Hasil Uji t

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	1.169	.083		14.084	.000
	IR	-.262	.099	-.327	-2.635	.009
	PAD	-.137	.116	-.148	-1.185	.038
	BM	-.108	.133	-.065	-.814	.417

Model

Sumber: Data sekunder diolah SPSS 22, 2022

Akibatnya, pendapatan antar pemerintah mempunyai nilai t -2,635 dan nilai Sig 0,009. < 0,05, H1a diterima serta H0 ditolak, sehingga pendapatan antar pemerintah mempunyai akibat negatif yang signifikan. Selain itu, pad memiliki nilai t -1,185 serta nilai Sig 0,038 < 0,05, H0 ditolak dan H1b diperoleh. Dengan demikian, pendapatan awal daerah memiliki efek positif yang signifikan. Dan akhirnya, belanja modal memiliki nilai t -,814 dan nilai 0,417 > 0,05, H0 diterima dan H1c ditolak. dengan demikian, belanja modal mempunyai nilai t -,814 dan nilai 0,417 > 0,05, H0 diterima serta H1c ditolak. dengan demikian, belanja modal mempunyai nilai t -,814 dan nilai 0,417 > 0,05, H0 diterima dan H1c ditolak. menggunakan demikian, belanja modal mempunyai nilai t -,814 serta nilai 0,417 > 0,05, H0 diterima dan H1c ditolak. menggunakan demikian, belanja modal mempunyai nilai t -,814 serta nilai 0,417 > 0,05, H0

diterima dan H1c ditolak. menggunakan demikian, belanja kapital memiliki nilai $t = -0.814$ serta nilai $0.417 > 0.05$, H0 diterima dan H1c ditolak. menggunakan demikian, belanja kapital memiliki nilai $t = -0.814$ serta nilai $0.417 > 0$. biaya tak mensugesti kinerja keuangan wilayah.

Simpulan dan Saran

Kesimpulan

Berdasarkan akibat kajian kinerja keuangan pemerintah kabupaten/kota pada Jawa Timur, dapat ditarik konklusi sebagai berikut:

1. Pendapatan yang tidak terkendali berdampak negatif terhadap kinerja keuangan pemda.
2. PAD bisa memberikan dampak positif terhadap kinerja keuangan pemda.
3. Belanja modal tidak boleh mempengaruhi kinerja keuangan badan swadaya warga setempat.

Batasan

Penelitian ini dilakukan secara ilmiah agar memperoleh akibat yang maksimal . namun, dalam empiris penelitian ini, masih terdapat keterbatasan, antara lain:

1. Sampel penelitian ini menggunakan pemkot dan kabupaten jawa timur, bukan seluruh pemerintah di pulau Jawa.
2. Penelitian ini menggunakan tiga variabel independen, yaitu *Intergovernmental Revenues*, *Regional Initial Revenues and Capital Expenditures*, dan tidak menyebutkan indikator keuangan daerah.
3. Masa tindak lanjut pada penelitian ini dilakukan selama 4 tahun, sebagai akibatnya tidak menggambarkan indikator keuangan daerah dalam jangka panjang.

Saran

Berdasarkan akibat penelitian, pembahasan, konklusi serta keterbatasan. kemudian ada kalimatnya, yang disampaikan sebagai berikut:

1. Bagi peneliti selanjutnya bisa menambah objek kajian yang dipergunakan, yaitu kepada Pemerintah Kota pada provinsi Jawa Timur.
2. Buat peneliti selanjutnya pada variabel terkait, koefisien efisiensi keuangan lain dari pemerintahan sendiri lokal bisa digunakan, yaitu koefisien independensi, koefisien efisiensi serta koefisien harmoni biaya
3. Bagi peneliti selanjutnya, variabel bebas bisa menambahkan variabel lain yang bisa mempengaruhi kinerja keuangan Pemerintah Daerah, diantaranya belanja modal, porto operasional, akibat audit, ukuran pemerintah serta SiLPA.

Daftar Pustaka

- Akhmad. 2019. *Manajemen Keuangan Daerah Dalam Era Otonomi Daerah*.
- Pratama AB at all. 2022. "Pengaruh Opini Audit BPK, Pendapatan Asli Daerah(PAD) DAN Intergovernmental Revenue Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Di Jawa Timur Tahun 2017-2019." 11(04):62—76.
- Mardianis, H. Afrizal, and Enggar. 2017. "Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dana Perimbangan,Belanja Daerah Dan Opini Audit BPK Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Di Provinsi Jambi."
- Siyoto, Sandu dan Sodik, Ali. 2015. *Dasar Metode Penelitian*. Edisi Pertama.s Literasi Media Publishing: Yogyakarta.
- Sugiyono. 2015. *Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Undang-Undang Nomor 15 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.
- Undang-Undang Nomor 32 Tentang Pemerintah Daerah.

Undang-Undang Nomor 33 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

<https://jatim.bpk.go.id/dari-media/menteri-keuangan-sri-mulyani-apresiasi-pemprov-jatim-raih-wtp-lebih-dari-lima-kali/>

*) **Ryansyah Ilham Sasti** adalah Alumni Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Malang

***) **Maslichah** adalah Dosen Tetap Universitas Islam Malang

****) **Junaidi** adalah Dosen Tetap Universitas Islam Malang